

**FAKTOR-FAKTOR PENUTUPAN THE KING ABDULLAH BIN ABDULAZIZ
INTERNATIONALCENTRE FOR INTERRELIGIOUS AND INTERCULTURAL DIALOGUE
(KAICIID) OLEH PEMERINTAH AUSTRIA TAHUN 2019**

Harmiyati

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: har3yati64@gmail.com

Muwalliha Syahdani

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: 151170041@student.upnyk.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang penutupan The King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) oleh Pemerintah Austria (GoA) pada tahun 2019. Untuk menjelaskan penutupan tersebut, artikel ini akan melihat perkembangan intensitas Islamofobia di ranah domestik Austria. Faktor Islamofobia menjadi faktor yang paling menonjol dari proses pengambilan keputusan Pemerintah Austria dalam menutup KAICIID. Faktor domestik tersebut terbagi ke dalam faktor domestik institusionalisasi kebijakan Islamofobia dan faktor domestik tindakan Islamopofia dari masyarakat Austria. Pembunuhan Jamal Kashoggi, Hukuman Raif Badawi, dan Hukuman Mati Murtaja Quereiris menjadi faktor eksternal yang dijelaskan dari penutupan KAICIID. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur.

Kata kunci: Islamofobia, Austria, KAICIID, Interreligious Dialogue, Arab Saudi, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This article discusses the closure of The King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) by the Government of Austria (GoA) in 2019. To explain the closure, this article will see the development of Islamophobia intensity in the domestic sphere of Austria. This factor becomes the most notable factor from the decision-making process of GoA in closing the KAICIID. These domestic factors are divided into domestic factors of institutionalization of Islamophobic policies and domestic factors of Islamophobic actions from Austrian society. The murder of Jamal Khashoggi, Raif Badawi's sentence, and the death penalty of

Murtaja Quereiris were the external factors explained by the closure of KAICIID. The research method used in this article is qualitative with literature study data collection techniques.

Keywords: Islamophobia, Austria, KAICIID, Interreligious Dialogue, Saudi Arabia, Human Rights

PENDAHULUAN

Austria dulunya dikenal sebagai tempat yang ramah bagi penduduk Muslim di Eropa. Negara ini membuat kebijakan yang berbeda dengan negara-negara tetangganya di Eropa seperti Belanda, Perancis, dan Inggris. Kebijakan yang berbeda tersebut dinobatkan sebagai model Eropa dalam memberi hak sekaligus tanggung jawab bagi komunitas Muslim di sana (Bell, 2012). Berbekal dari pengalaman tersebut, Austria khususnya Wien menjadi tempat pilihan bagi para pengungsi ketika terjadi krisis imigran di tahun 2015. Krisis tersebut merupakan puncak dari perang saudara yang tidak berhenti sejak kawasan Arab mendeklarasikan negara mereka sebagai negara demokratis atau peristiwa yang dikenal sebagai Musim Semi Arab (Arab Springs).

Austria kewalahan untuk menerima pengungsi dimana sekitar 90.000 pencari suaka dalam tempo yang cepat dari negara-negara Islam ketika Eropa mengalami krisis di tahun 2015 (BBC, 2016). Austria mengalami satu fenomena "Islamofobia" secara sistemik yang terjadi mulai dari pengambil kebijakan sampai ke masyarakat di tingkat paling bawah. Hal tersebut tetap tidak dapat dihindari meski Austria sendiri merupakan negara di Eropa dengan presentase Muslim cukup banyak, yaitu sekitar 8 persen dari populasi atau sebanyak 700.000 – dari jumlah populasi (Die Presse, 2017). Sikap dan sentimen terhadap Islam tersebut tercermin dari berbagai narasi, tindakan, hingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin politik di Austria—hingga ke masyarakat yang dijelaskan dalam segmen Islamofobia pada artikel ini.

Pendirian KAICIID (The King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue) di Austria sendiri tidak lepas dari hubungan panjang yang dimiliki Arab Saudi dengan Austria. Negara ini menjadi tempat pilihan Arab Saudi untuk mendirikan OPEC atau Organization for Petroleum Exporting Countries yang masih berdiri hingga saat ini. Selain itu, hubungan dagang yang cukup erat dimana Arab Saudi menjadi mitra dagang terbesar Austria setelah Cina, Jepang, Korea selatan, India dan Turki turut menjadi faktor

berdirinya KAICIID di Austria. Total neraca perdagangan kedua negara mencapai 5 triliun. Misi dari KAICIID adalah untuk mempromosikan perdamaian, toleransi dan pemahaman di antara orang-orang dari agama dan budaya yang berbeda. Pekerjaan KAICIID termasuk menggunakan dialog untuk mendukung upaya perdamaian dan kohesi sosial di daerah konflik.

Mendirikan organisasi dialog antar agama telah lama menjadi upaya bagi negara dari Timur Tengah untuk menutupi sejarah pelanggaran HAM mereka (Kumaraswamy, 2016). Hal yang sama pernah dilakukan oleh Bahrain untuk mendirikan organisasi dialog antar agama—King Hamad Chair for Interreligious Dialogue yang bermarkas di La Sapienza, Italia. Kedua organisasi tersebut—KAICIID dan King Hamad Chair for Interreligious Dialogue—dianggap sebagai upaya pemerintahan Timur Tengah untuk menutup pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sistemik yang terjadi.

KAICIID sendiri ditutup lewat Resolusi Dewan Nasional tanggal 12 Juni 2019 tentang pembebasan Murtaja Qureiris dan penutupan KAICIID. Resolusi tersebut tercatat dalam nomor 77/E XXVI. GP yang berbunyi: Resolusi Dewan Nasional 12 Juni 2019 tentang pembebasan Murtaja Qureiris dan penutupan Abdullah Center. Pemerintah Federal, khususnya Menteri Federal untuk Eropa, Integrasi dan Luar Negeri, diminta untuk:

1. Menggunakan segala cara politik dan diplomatik yang dimilikinya untuk mencegah eksekusi pemuda Murtaja Qureiris sekaligus mendapatkan status pembebasannya;
2. Menarik diri dari perjanjian pendirian Pusat Internasional Raja Abdullah bin Abdulaziz untuk Dialog Antaragama dan Antarbudaya ("Perjanjian Pendirian") (Perjanjian Pendirian Pasal XVIII);
3. Untuk mengakhiri perjanjian terkait di kursi Pusat Internasional Raja Abdullah bin Abdulaziz untuk Dialog Antaragama dan Antarbudaya ("Perjanjian Markas Besar") (Perjanjian Markas Besar Pasal 23). Dari resolusi tersebut KAICIID benar-benar ditutup dari Austria.

Dari penelitian ini, penulis melihat adanya celah penelitian (research gap) antara objek penelitian KAICIID dengan riset yang telah dilakukan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Abu-Nimer & Smith (2016) yang membahas pendidikan dialog antar agama dan antarbudaya dari kacamata KAICIID. Lalu ada penelitian dari Grung (2017) membahas tentang praktik dialog antar agama yang dilakukan KAICIID. Sehingga tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan

mengenai bagaimana faktor penutupan KAICIID dilihat dari perspektif dalam negeri dan perspektif luar negeri dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri milik Richard C. Snyder.

Penyusunan karya tulis ini menggunakan teori kebijakan luar negeri milik Richard C. Snyder yang dikutip dari buku beliau "Foreign Policy Decision-Making: Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics" terbitan revisi tahun 2002. Kebijakan Luar Negeri adalah seperangkat tindakan yang digunakan untuk memilih berbagai kemungkinan alternatif yang ada dan tersedia untuk keberlanjutan suatu negara. Richard C. Snyder dalam tulisannya membagi pusat perhatian pada politik internasional ke dalam aksi, reaksi, dan interaksi. Sehingga dalam perumusan konsep kebijakan luar negeri, menghasilkan pertanyaan "how and why do national actors perform as they do in international relations?".

Snyder memberikan dua faktor utama yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri yaitu faktor subjektif dan sumber-sumber potensial. Faktor subjektif adalah persepsi para aktor politik dalam hal ini adalah pemimpin negara dalam mendefinisikan situasi. Faktor subjektif dianggap sebagai saluran realita objektif. Persepsi subjektif aktor sangat berpengaruh besar karena dalam situasi apapun, cara aktor menginterpretasikan situasi tersebut akan sangat menentukan hasil dari proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Selain faktor subjektif, sumber-sumber potensial dianggap sebagai faktor utama dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Sumber-sumber potensial menurut Snyder bisa berasal dari dalam negeri (internal setting) dan berasal dari luar negeri (external setting). Internal setting adalah politik domestik termasuk opini publik yang berkembang di dalam negeri, sedangkan external setting adalah faktor-faktor non-pemerintah dan interaksi antar negara yang terjadi termasuk tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Lingkungan internal dan eksternal tersebut memiliki kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara yang diteliti.

Teori kebijakan luar negeri milik Richard C. Snyder menyimpulkan bahwa berbagai faktor yang diperhitungkan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh aktor politik. Kelebihan dari teori milik Richard C. Snyder tersebut adalah dimensi manusia dianggap lebih efektif daripada proses pembuatan keputusan luar negeri. Oleh sebab itu, faktor-faktor paling penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan dari suatu keputusan luar negeri

adalah:

1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam hal ini nilai Islamofobia)
2. Arus informasi diantara aktor politik
3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan aktor politik (dalam hal ini ialah tindakan pemerintah Arab Saudi yang dianggap melanggar HAM)
4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan, bisa dalam keadaan krisis atau tidak krisis.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara akan memperhitungkan lingkungan domestik sebagai determinan dalam pengambilan kebijakan. Kondisi dalam negeri Austria yang terangkum dalam orientasi nilai-nilai utama menjadi faktor kunci dalam keputusan pemerintah Austria menutup KAICIID. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai Islamofobia yang menjadi keyakinan masyarakat secara luas dan elite politik Austria. Keyakinan tadi membuat nilai-nilai tersebut semakin terinstitusionalisasi dari kebijakan yang pernah dikeluarkan. Salah satunya yaitu larangan penggunaan penutup wajah bagi umat perempuan Muslim di Austria. Selain itu, penyerangan secara personal berdasar identitas agama Islam terjadi di Austria.

Faktor eksternal yang menjadi alasan pemerintah Austria menutup KAICIID adalah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi itu sendiri sebagai negara sponsor dari KAICIID. Berbagai tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terangkum dalam berbagai tindakan seperti vonis hukuman mati terhadap Murtaja Quereiris, pemenjaraan terhadap anak di bawah umur, hukuman cambuk yang menjadi tontonan umum, selain pengekangan nilai-nilai pers dan demokrasi yang belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Arab Saudi. Seperti dalam kasus pencambukan Raif Badawi di muka publik yang dilakukan sebab Badawi mendukung penerapan nilai-nilai kebebasan bersuara di Arab Saudi. Pemerintah Austria bahkan menganggap KAICIID sebagai "The Silent Center" yang diam saja saat pemerintah Arab Saudi melakukan tindakan yang dianggap melanggar HAM.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis.

Dirumuskan oleh Sugiyono (2013), sifat penelitian eksplanatif dikategorikan dalam penelitian penjelasan atau explanatory research yang mana tujuan dari penelitian tersebut adalah menjelaskan hubungan dan pengaruh melalui pengujian hipotesa yang digunakan dalam penelitian. Hipotesa tersebut yaitu faktor domestik dan faktor eksternal dari kebijakan luar negeri Austria. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan bahan bacaan yang sesuai dari faktor-faktor yang dijelaskan di dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

Awal Mula Terbentuknya KAICIID

KAICIID telah berdiri secara resmi sejak 26 November 2012. Ini merupakan tanggal peresmian berdirinya organisasi tersebut sejak diadakannya konferensi untuk membahas pendirian KAICIID di 2008. Sebelumnya, di tahun 2011, tepatnya di tanggal 12 Oktober tahun 2011, Republik Austria, Kerajaan Arab Saudi, Kekaisaran Spanyol dan Takhta Suci Vatikan menandatangani Perjanjian Pendirian KAICIID atau Agreement for the Establishment di Wina. Enam bulan setelahnya, Tim Formatur KAICIID membentuk struktur keorganisasian KAICIID dengan memilih Sekretaris-Jenderal Interim, Badan Direksi Interim, dan berbagai posisi lain sebagai bagian dari Perjanjian Pendirian (Founding Agreement).

KAICIID menjadi satu preseden penting bagi pendirian organisasi dialog antaragama dan antarbudaya yang dilakukan oleh golongan Islam. Keberadaan KAICIID di Austria dilakukan untuk mendukung reformasi terhadap masyarakat Arab Saudi melalui dialog. Inisiasi pendirian KAICIID di Austria dilakukan mengikuti Visi 2030 milik Arab Saudi yang dibawa oleh Raja Salman al Saud sebagai penerus Raja Abdulaziz al Saud. Visi tersebut diperkenalkan oleh Raja Salman sebagai upaya reformasi Arab Saudi di negaranya—termasuk untuk melakukan diversifikasi ekonomi dari minyak mentah yang menjadi komoditas unggulan Arab Saudi. Pendirian organisasi dialog antaragama menjadi menjadi satu bidang studi sosial tersendiri yang perlu

diurusutamakan.

Di tahun 2011, Vatikan, Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Spanyol dan Republik Austria menandatangani Perjanjian Pendirian KAICIID atau Agreement for the Establishment di Wina. Penandatanganan ini berlangsung di tanggal 12 Oktober tahun 2011. Enam bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut, tepatnya bulan April tahun 2012, struktur keorganisasian KAICIID dibentuk. Pendirian struktur organisasi ini untuk meletakkan implementasi dasar dari tujuan pendirian KAICIID yang ditandatangani tahun 2011. Perjanjian pendirian berlaku sejak 21 Oktober tahun 2012.

Setelah peresmiannya, KAICIID langsung menjalankan berbagai program dan proyek untuk mengembangkan kapasitas individu untuk terlibat dalam misi dialog yang ditawarkan. Fokus kawasan dari KAICIID sendiri berfokus pada kawasan yang memiliki lembaga keagamaan yang beragam seperti Republik Afrika Tengah, kawasan Arab, Myanmar, dan Nigeria. Selain itu, proyek KAICIID dilakukan terintegrasi dengan TPB atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti #TheFaith4SDGs lalu ada G20 Interfaith Forum dengan tujuan akhir inklusivitas dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, KAICIID menawarkan program fellowship dalam hal keagamaan untuk memberikan pelatihan dialog (antar agama dan antar budaya), komunikasi antar budaya dan promosi kohesi sosial pada masyarakat.

Faktor Domestik Penutupan KAICIID

a. Institusionalisasi Islamofobia di Austria: Amandemen Hukum Islam 1912

Sejak 2015, Islamofobia di Austria telah terinstitusionalisasi atau melembaga oleh aktor-aktor politiknya. Di tahun 2015, Austria mengeluarkan amandemen terhadap kebijakan yang mengatur keberadaan populasi Muslim lewat Hukum Islam 2015 (Islam Law of 2015). Hukum tersebut merupakan revisi dari hukum Hukum Islam 1912 yang mengatur penduduk Muslim khususnya penduduk Muslim Bosnia-Herzegovina ketika Austria masih berbentuk kerajaan. Hukum Islam 1912 diamandemen karena dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi Muslim di Austria. Hukum Islam 1912 hanya setebal dua halaman dan tidak menjawab tantangan sosial, hukum dan keagamaan di masa kini.

Sebelum disahkan, Undang-Undang (UU) ini mendapat perlawanan dari berbagai

komunitas Muslim di Austria, salah satunya dari Komunitas Agama Islam IGGÖ (Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich). Dengan hak korporatis yang diberikan, IGGÖ bisa memberikan pernyataan (statements) untuk mendukung atau menolak terhadap draft Undang-Undang Hukum Islam yang disusun oleh parlemen. Pada periode penyusunannya, terdapat 150 pernyataan dari kelompok Muslim Austria yang bersifat menentang UU tersebut (Hafez, 2017). Pernyataan yang dikeluarkan cukup timpang jika dibandingkan dengan 10 pernyataan dari kelompok Yahudi di Austria yang hukumnya juga mengalami revisi (Hafez, 2017). Ketika itu, presiden IGGÖ, Dr Fuat Savaş, mundur dari jabatannya di tahun 2016.

Peraturan tersebut salah satu pasalnya menyebut untuk menghentikan perizinan pembiayaan dari luar untuk masjid-masjid di Austria, khususnya dari Turki dan Arab Saudi. Tujuan dari diamandemennya Undang-Undang ini salah satunya adalah pemerintah Austria ingin membuat masyarakat Muslim di sana lebih bercirikan masyarakat muslim Austria. Larangan ini ditujukan secara spesifik untuk mengatur pengaruh dari Turki dan Arab Saudi yang telah lama mengirimkan bacaan Kuran versi mereka untuk dipelajari oleh Muslim di Austria. Arab Saudi sudah lama membangun masjid dan pusat peribadatan yang dianggap menyebarkan pengaruh terhadap sekolah-sekolah dan pusat budaya dan agama yang tersebar di Austria.

Dari hukum tersebut, pemerintah Austria mengatur bahwa aktivitas atau operasi dari komunitas Muslim di dalam negeri harus didanai dari dalam negeri pula. Sumbangan satu kali dari luar negeri umumnya tidak dilarang, tetapi administrasi atau pencatatan harus dilakukan di dalam negeri. Pengaturan tersebut juga mengatur bahwa aktivitas atau operasi dari komunitas perlu dilaporkan ke Kantor Urusan Gereja dan Agama seperti pemilihan presiden baru, perubahan dari konstitusi organisasi, dan metode mengajar keagamaan yang dilakukan. Selain itu, edisi Qur'an yang beredar di Austria dan penyampaian khotbah oleh Imam harus berbahasa Jerman agar mudah untuk dilacak. Dari peraturan ini, terlihat pemerintah Austria menunjukkan sikap kehati-hatian dengan mempersempit aktivitas dari komunitas Muslim di sana.

b. Penutupan 7 Masjid dan Pengusiran 60 Imam di Tahun 2017

Penutupan dari 7 Masjid dan Pengusiran 60 Imam di Austria merupakan dampak dari diamandemennya Undang-Undang Islam tahun 2015. Salah satu masjid yang ditutup memiliki

afiliasi dengan ATIB atau Asosiasi Budaya Islam-Turki (Turkish-Islamic Cultural Association) yang berada langsung di bawah Direktorat Urusan Agama atau Diyanet. Lewat organisasi ini, para imam di Austria dibiayai dan dilatih untuk diberi penugasan di Austria. Alasan dari juru bicara ATIB untuk membiayai dan melatih para imam dan masih menggunakan bahasa Turki karena belum ada pelatihan dan pembiayaan yang layak bagi para imam di Austria (Yahoo, 2018). Masjid lain yang ditutup memiliki afiliasi dengan partai sayap kanan Turki—Serigala Abu-abu (Grey Wolves). Tiga masjid lain yang ditutup berada di Wina, dua di Austria Atas dan satu di Carinthia. Masjid lain yang ditutup memiliki afiliasi dengan kelompok denominasi agama yang disebut Arab Religious Association.

Selain akibat amandemen Hukum Islam, penutupan ini dipicu oleh salah satu masjid berafiliasi dengan ATIB yang memeragakan pertempuran Gallipoli pada Perang Dunia I di halaman masjid. Pemeragaan tersebut disebar lewat gambar-gambar dari majalah mingguan Falter yang muncul pada bulan April. Di majalah tersebut, anak-anak di sebuah masjid yang didukung Turki berpura-pura mati dengan menggunakan seragam kamuflase dan berbaris, memberi hormat sambil mengibarkan bendera Turki. “Mayat” mereka kemudian dibariskan dan dibungkus dengan bendera. ATIB memiliki tanggung jawab untuk melatih para imam dan ditempatkan sebagai aparaturnegara di Turki. Salah satu dari tujuh masjid yang ditutup berlokasi di Distrik Favoriten, di Wina, Austria. Tiga masjid lain yang ditutup berada di Wina, dua di Austria Atas dan satu lagi di Carinthia. Satu dari keenam masjid yang ditutup memiliki afiliasi dengan kelompok denominasi agama yang dikenal sebagai Arab Religious Association atau Kelompok Religius Arab (BBC, 2018). Penutupan 7 Masjid dan pengusiran 60 Imam di tahun 2017 menjadi salah satu faktor domestik menguatnya Islamofobia di Austria.

c. Larangan Penggunaan Penutup Wajah yang Dikhususkan bagi Wanita Muslim

Kembali di tahun 2017, tepatnya di bulan Oktober, pemerintah Austria melakukan pelarangan secara total terhadap penggunaan penutup wajah yang digunakan oleh penduduk Islam. Larangan ini menyusul setelah larangan yang sama dikeluarkan oleh Pemerintah Perancis dan Belgia di tahun 2011 (BBC, 2018b). Dalam ayat peraturan tersebut, wajah dilarang untuk ditutup dan harus terlihat mulai dari ujung rambut sampai ujung dagu ketika seorang wanita berada di tempat publik. Penutup wajah yang umum digunakan adalah Burka dan Niqab.

Sosialisasi dari aturan Hukum Larangan Penutup Wajah berjalan sejak diundangkannya melalui radio dan tv nasional Austria yaitu Austria Broadcasting Corporation. Tercatat di tahun 2018 hanya ada 29 pelanggar dari hukum tersebut khususnya di kota Wina sejak berlaku di bulan Oktober tahun 2017 (Oltermann, 2017). Larangan tersebut merupakan wujud 'Islam Politik' yang dikeluarkannya oleh kanselir terpilih, Sebastian Kurz. Larangan akan berlanjut kepada larangan penggunaan jilbab bagi anak Sekolah Dasar bahkan TK. Kurz dan koalisi partai Sosial Demokrat menganggap masyarakat parallel yang dihuni oleh penduduk Muslim dimulai sejak pendidikan dasar (Reuters, 2018).

Larangan penggunaan penutup wajah di tempat-tempat publik seperti ini merupakan bagian dari upaya yang disebut pemerintah Austria untuk melakukan integrasi terhadap masyarakat Muslim imigran, khususnya yang berasal dari Timur Tengah. Larangan penggunaan penutup wajah merupakan bagian integral dari peraturan sebelumnya yang disebut "Pelatihan Integrasi Wajib" untuk melatih para imigran wanita agar terintegrasi secara sosial dan budaya di Austria. Pelatihan terdiri dari pelatihan bahasa Jerman dan bekerja tanpa dibayar saat menunggu validasi ijin tinggal. Wanita Muslim yang terlihat masih menggunakan penutup wajah di tempat-tempat publik akan dikenai denda sebesar €150 atau sekitar Rp2.419.704 (Klamar, 2017). Larangan penggunaan penutup wajah yang dikhususkan bagi wanita muslim menjadi salah satu bukti menguatnya Islamofobia di Austria. Penggunaan penutup wajah dari latar belakang budaya apapun merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dimiliki setiap individu.

d. Larangan Penggunaan Jilbab bagi Anak Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak

Larangan penggunaan jilbab bagi anak sekolah dasar dan taman kanak-kanak mulai diaktifkan sejak 15 Mei 2019. Isi peraturan tersebut berbunyi , "ideologically or religiously influenced clothing which is associated with the covering of the head" tanpa menyebut penutup wajah atau jilbab umat Muslim secara spesifik. Narasi ini digunakan untuk menunjukkan sisi pembelaan Austria yang masih berupaya untuk bersikap egaliter terhadap ideologi atau agama tertentu. Larangan ini disebut untuk membebaskan anak perempuan dari pengaruh agama atau ideologi tertentu.

Larangan yang menyasar penggunaan jilbab ini terlihat jelas dari pernyataan pemerintah

yang menyebut penutup kepala "Patka" yang digunakan oleh umat Yahudi tidak akan terpengaruh dari kebijakan tersebut. Perban medis dan pelindung hujan atau salju juga tidak termasuk dalam daftar larangan yang disetujui. Secara spesifik, larangan ini menasar anak-anak berusia dibawah 10 tahun yang dikenakan oleh orang tuanya untuk tetap menggunakan jilbab di sekolah. Larangan ini disebut akan dilanjutkan untuk penggunaan jilbab bagi para murid sekolah menengah, universitas, hingga ke pejabat publik perempuan. Orang tua yang masih memaksakan jilbab kepada anak perempuan untuk bersekolah akan dikenai denda sebesar €440 atau sekitar Rp7.163.886 atau dipenjara selama dua minggu (Kiyagan, 2018).

Pemerintah Austria menyebut, larangan ini dibuat untuk mencegah masyarakat Muslim Imigran secara umum atau siswi-siswi tersebut untuk terperangkap ke dalam "Masyarakat Paralel (Parallel Society)". Masyarakat parallel mengacu pada pengorganisasian diri dari etnis atau agama minoritas—sering tapi tidak selalu—kelompok-kelompok imigran dengan maksud kontak spasial, sosial dan budaya yang berkurang atau minimal dengan masyarakat mayoritas di mana mereka bermigrasi (Bundeszentrale für politische Bildung, 2012). Masalah ini dilihat pemerintah Austria muncul sejak usia dini yaitu sejak Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak Islam yang mengajarkan pendidikan agama sejak dini. Pemerintah Austria menganggap anak-anak tersebut harus diberikan kesempatan yang sama dengan anak-anak lain dan mengenakan jilbab hanya membuat mereka merasa berbeda dan lebih terasimilasikan dengan budaya asli Austria (Sezgin, 2018). Larangan penggunaan penutup wajah bagi anak-anak sekaligus tuduhan membentuk masyarakat paralel merupakan salah satu faktor domestik Islamofobia yang dijelaskan dalam artikel ini sebagai faktor domestik penutupan KAICIID.

e. Tindakan Islamofobia dari Penduduk Asli Austria

Tindakan islamofobia dilakukan tidak terbatas oleh aparaturnya atau lembaga negara yang bersifat institusional. Tindakan anti-Islam juga dilakukan oleh masyarakat Austria itu sendiri sebagai kelompok yang hidup dan saling berdinamika satu sama lain. Menurut survey yang dilakukan Fundamental Rights Agency (FRA), sebanyak 31 persen penduduk Austria memiliki pandangan negatif terhadap penduduk Muslim di sana (FRA Report, 2017). Hal ini membuat mereka enggan hidup berdampingan atau hidup bertetangga dengan penduduk Muslim. Tindakan Islamofobia yang dilakukan antar kelompok masyarakat terjadi secara sporadik

sehingga terkadang tidak diliput media besar. Bentuk tindakan Islamofobia yang dilakukan terangkum dalam berbagai bentuk dan dimensi seperti kejahatan mural hingga menjeri penduduk Muslim yang melintas di jalanan.

Larangan penggunaan jilbab di sekolah dasar dan taman kanak-kanak telah menimbulkan rasa tidak aman terutama di fasilitas anak-anak yang dijalankan oleh penduduk Muslim seperti sekolah Islam. Hal ini membuat guru atau staf pengajar kerap menerima penyerangan dari masyarakat sekitar yang bersifat intimidatif seperti didorong ketika keluar dari transportasi umum—ketika sang guru mengenakan jilbab—atau dilempar kaleng bir. Larangan penggunaan jilbab bagi anak-anak ternyata berdampak luas sampai ke guru-guru mereka bahkan sampai ke sekolahnya yang sekarang dicoret-coret dengan kata-kata yang menunjukkan kebencian terhadap Islam. Spanduk bertuliskan “Stop Islamization. Close Islam schools!” sempat terpasang di sekolah Islam di Wina oleh kelompok Identitarian sayap kanan Austria tahun 2017 lalu. Berikut penampakan spanduk tersebut:

Gambar 1 Media Spanduk Dengan Tulisan Penuh Kebencian Terhadap Agama Islam



Sumber: Bayrakli., Enes dan Farid, Hafez. (2018). European Islamophobia Report. Diambil dari: <https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2018/04/Austria.pdf>

Tindakan Islamofobia di Austria pernah menimbulkan satu kejadian yang sangat mencekam. Ketika di tanggal 8 April 2019 terdengar suara tembakan berulang kali di depan Pusat Agama Islam (Islamic Center) di jalan Bruckhausen, Floridsdorf, Wina (Oe24, 2019). Sesaat setelah mendengar suara tersebut, polisi bergegas ke lokasi dan ditemukan dua orang pengemudi mobil sedang bertengkar. Hal yang paling menjadi perhatian dari kasus tersebut

adalah karena tembakan di masjid mengingatkan peristiwa di Selandia Baru yang memakan korban jiwa. Suara tembakan yang terjadi di masjid terbesar di Wina tersebut tidak memakan korban, setelah diinvestigasi tidak ada motif politik yang dilibatkan dan hanya menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat yang melintas (Bayrakli, 2018).

Ekspresi anti-Islam berlanjut di tahun 2019 terlihat dengan ditemukannya stiker bertuliskan "PENGUNGSI TIDAK DITERIMA/RAPEFUGEES NOT WELCOME" yang terlihat di bangku di Distrik Kelima, Wina. Pengungsi biasanya diidentikkan dengan pengungsi Muslim, terutama setelah terjadinya "Krisis Imigran" di tahun 2015. Berikut adalah gambar stiker anti-pengungsi tersebut:

Gambar 2 Media stiker dengan Gambaran Penolakan Terhadap Pengungsi



Sumber: Bayrakli., enes dan farid, hafez. (2018). European islamophobia report. Diambil dari: <https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2018/04/austria.pdf>

Sebuah laporan dari Kim Traill—seorang jurnalis yang berlokasi di Wina menyebutkan seorang warga Austria keturunan Turki mengalami pelecehan dan tindakan kekerasan hanya karena ia berjalan bersama ibunya yang menggunakan pakaian muslim lengkap. Tuba, wanita Muslim berusia 30 tahun yang bahkan tidak berpakaian seperti Ibunya menerima perlakuan tidak menyenangkan dari penduduk lokal Austria yang berkulitputih dan memiliki perawakan seperti orang Eropa. Tuba saat itu tidak mengenakan penutup kepala Muslim, hanya kemeja, celana panjang dan bahkan tindik di hidungnya.

Ini terjadi di bulan Maret tahun 2019 di depan toko lokal dekat tempat tinggalnya di kota St Pölten, di negara bagian Austria Bawah yang berjarak sekitar 65 kilometer dari Wina. Ia bersama Ibunya ketika itu berada di tengah gang yang ramai lalu berbicara bahasa Turki. Tiba-

tiba seorang wanita dan putranya mulai menghina mereka dan berteriak agar mereka menyingkir. Pelecehan tersebut dibalas oleh Tuba dan ia mendapat teriakan balasan bahwa wanita tersebut adalah orang Austria asli sehingga ia bisa mengatakan apa yang ia ingin katakan. Tuba membalas bahwa ia juga orang Austria dan mereka punya hak yang sama di hadapan hukum. Mereka berdebat panjang.

Kemudian, tindakan pelecehan berganti menjadi tindakan kekerasan dengan wanita tersebut mencengkram leher Tuba, tepat di sebelah kerah kemejanya. Tuba masih mengingat betul kejadian tersebut. "Saya benar-benar terkejut, begitu juga ibu saya. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon polisi." Wanita tersebut bersama anaknya kemudian melepaskan cengkramannya dan pergi ke tempat parkir sambil tetap mengumpat Tuba dan Ibunya. Mereka mengumpat dengan bahasa lokal sana seperti 'wogs', 'arseholes', 'worms', dan 'subhumans' sambil berteriak bahwa Tuba dan Ibunya harus kembali ke tempat asal mereka. Tetapi Austria merupakan tanah kelahiran Tuba, melihat perjalanan panjang keluarganya yang dibawa dari Turki untuk membangun kembali Austria setelah Perang Dunia Kedua.

Sejak saat itu, Tuba merasa bahwa dirinya adalah wanita yang kuat. Ketika polisi datang ke lokasi kejadian, disampaikan bahwa mereka tidak dapat menerima laporan Tuba karena Tuba tidak mendapatkan luka fisik di badannya dan kasus tersebut ditutup. Tuba mendapat saran untuk membawa kasusnya ke Pusat Dokumentasi dan Konsultasi untuk Islamofobia dan Rasisme terhadap Muslim (Documentation and Consultancy Community for Islamofobia and Against Muslim Prejudice) yang berlokasi di Wina. Atas saran dari Pusat Dokumentasi dan Konsultasi, Tuba kembali ke polisi untuk mengajukan pengaduan laporan kembali. Tuba tidak dipanggil kembali oleh Polisi sampai sekarang (Traill, 2019).

Tuba hanyalah satu dari sekian banyak penyerangan dengan latar belakang agama Islam yang menyerang penduduk Muslim di Austria. Sebuah laporan dari Pusat Dokumentasi dan Konsultasi untuk Islamofobia dan Rasisme terhadap Muslim di bulan April tahun 2019 tercatat peningkatan dalam jumlah insiden Islamofobia di seluruh Austria: dari 156 pada 2015, menjadi 253 pada 2016, 309 pada 2017, dan sekarang 540 pada 2018 (Kiyagan, 2019). Dari jumlah tersebut, 83 persen korban adalah wanita, 46 persen terlibat pidato kebencian online (termasuk intimidasi, menyerukan kekerasan terhadap Muslim atau membandingkannya dengan hewan),

17 persen laporan tentang grafiti kebencian (ekspresi seperti "tikus Muslim", "Muslim out", "F*** Muslim" disemprotkan di tempat umum), dan 14 persen adalah serangan verbal dan penghinaan yang terjadi di tempat umum seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, taman, kolam renang, dan transportasi umum (Traill, 2019). Wanita telah diludahi, dilecehkan saat bersama anak-anak mereka yang masih kecil dan menyebut segala sesuatu mulai dari "pelacur" hingga "Untermensch", istilah periode Nazi yang dilarang yang berarti "tidak manusiawi". Pernah ada seorang guru berjilbab yang diberitahu oleh muridnya bahwa dia mengenal orang-orang "yang berpikir akan lebih baik jika semua Muslim mati." Hal ini memberi penjelasan tentang insiden penyerangan warga Austria berlandaskan motif fobia berlatarbelakang agama Islam.

Islamofobia di Austria terus meningkat sejak "krisis pengungsi" di benua Eropa pada musim panas tahun 2015, yang menyebabkan 90.000 pengungsi Muslim dari negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak mengajukan permohonan suaka di Austria (BBC, 2016). Mereka tidak pernah diterima dengan ramah khususnya oleh para politisi sayap kanan dan media yang menggambarkan para pendatang sebagai "teroris potensial" dan "migran ekonomi yang mencari keuntungan dari sistem kesejahteraan Austria". Hal ini mengakibatkan, kenaikan paradigma Islamofobia itu sendiri di berbagai level di Austria baik mereka yang ada di akar rumput hingga mereka yang berada di tingkatan pengambilan kebijakan dengan mengeksploitasi sentimen anti-Islam tersebut untuk memenangkan partai mereka di Pemilihan Umum.

Faktor Eksternal Arab Saudi dalam Penutupan KAICIID

Faktor eksternal menjadi satu bagian dari penerapan teori "Kebijakan Luar Negeri" milik Richard C. Snyder. Faktor eksternal yang akan dijelaskan dalam artikel ini adalah pelanggaran HAM Arab Saudi yang mengekang kebebasan masyarakat untuk bersuara. Pelanggaran HAM tersebut terbagi ke dalam tiga tindakan yaitu: Hukuman Cambuk terhadap Raif Badawi, Pembunuhan Jamal Khashoggi di Turki dan yang terakhir ialah vonis hukuman mati terhadap Murtaja Quereiris.

a. Hukuman Cambuk dan Penjara terhadap Raif Badawi

Raif Badawi merupakan seorang blogger asal Arab Saudi yang menulis di website "Free

Saudi Liberals". Badawiditangkap pada tahun 2012 atas tuduhan menghina Islam melalui saluran elektronik miliknya tersebut. Ia dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan berbagai tuduhan termasuk tindakan murtad atau keluar dari Islam. Dalam postingan blog miliknya, Badawi kerap menyampaikan pandangannya yang cukup radikal untuk diterima di Arab Saudi. Pandangan tersebut berupa postingan tentang kebebasan berekspresi dan beragama di Arab Saudi yang ketika itu masih didominasi kelompok Ultrakonservatif. Menurut Badawi: "Bagi saya, liberalisme berarti hidup dan membiarkan hidup berjalan seperti itu saja." (Hopper, 2018).

Meski beberapa kali diancam dan dipersekusi, Badawi masih aktif menyuarakan pandangannya tentang paham liberalisme yang ia anut, khususnya sekulerisme. Badawi pernah menulis di blog miliknya pada tanggal 28 September 2010 untuk mendukung "sekulersime sebagai perlindungan paling penting bagi warga suatu negara." Saat itu, rakyat Arab Saudi didesak oleh para ulama untuk tidak menghadiri perayaan yang dianggap sesat yaitu Hari Nasional Arab Saudi. Badawi menggarisbawahi pentingnya memisahkan agama dari negara. Di bulan Mei tahun 2009, koran Al-Hayyat dari Mekkah melaporkan bahwa rekening milik Raif Badawi dan istrinya dibekukan.

Badawi sudah ditahan di penjara Briman, Jeddah sejak penangkapannya tanggal 17 Juni 2012. Meski putusan hakim sendiri baru keluar tanggal 29 Juli tahun 2013. Ketika pembacaan dakwaannya, komunitas internasional menuding bahwa pembacaan dakwaan tersebut tidak memenuhi standar transparansi dan keadilan internasional ketika pengacara Badawi sendiri dilarang untuk masuk. Badawi menerima tuduhan menghina Islam dan tuduhan murtad walau saat itu ditegaskan kembali oleh Badawi sendiri bahwa ia adalah seorang Muslim. Setelah dipersekusi berkali-kali, Badawi resmi ditahan di tahun 2014 dengan hukuman 10 tahun penjara, 1.000 cambukan, dan denda sebesar €235 atau sekitar Rp3.826.166 (Dw, 2021). Pencambukan akan dilakukan 20 minggu setiap hari Jum'at di depan orang banyak di halaman sebuah masjid di Jeddah.

Reaksi dari pemerintah Austria dalam menanggapi kasus hukuman cambuk Raif Badawi adalah ketika kedua negara—Austria dan Arab Saudi mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut membahas dan menyampaikan keberatan Austria secara langsung terhadap vonis Badawi sebagai vonis yang tidak berperikemanusiaan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas

peran Arab Saudi itu sendiri dalam menangani relokasi pengungsi Suriah khususnya di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi dianggap belum melakukan banyak hal terkait masalah tersebut. Reaksi dari masyarakat Austria terhadap hukuman cambuk ini ditunjukkan dengan melakukan aksi damai/protes di depan kantor KAICIID yang menghasilkan pertemuan Dewan Pengatur Kebijakan Luar Negeri Austria untuk mendiskusikan kemungkinan penutupan KAICIID (Pongratz-Lippitt, 2015).

b. Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi

Jurnalis asal Arab Saudi yang datang ke Turki—Jamal Khashoggi—dibunuh tanggal 2 Oktober tahun 2018 di kompleks Konsulat Jendral Arab Saudi di Istanbul, Turki. Khashoggi merupakan seorang jurnalis dan kolumnis portal berita The Washington Post. Ia melakukan pengasingan mandiri di Amerika Serikat. Khashoggi dipaksamenceraikan istrinya di tahun 2017 oleh pemerintah Arab Saudi dan ia dilarang menulis, termasuk menulis di media sosial—Twitter. Khasoggi ketika itu datang ke Konsulat Jendral Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus pernikahannya dengan istri barunya—Hatice Cengiz.

Khashoggi sebelumnya sempat datang ke Konsulat Jendral tersebut tanggal 28 September 2018 untuk mendapatkan Surat Cerai (Certificate of Divorce) dari pernikahannya dengan mantan istrinya. Tetapi ia belum bisa mendapatkan surat tersebut dan diminta untuk kembali tanggal 2 Oktober. Hatice menunggu Khashoggi di luar konsulat saat pembunuhan itu terjadi di tanggal 2 Oktober. Khashoggi terlihat memasuki gedung konsulat jam 13:14 waktu Turki. Rentang waktu kembalinya Khashoggi ke Konsulat adalah rentang waktu penyusunan skenario pembunuhannya oleh Kerajaan Arab Saudi.

Saat memasuki gedung, Khashoggi menitipkan handphone miliknya ke Cengiz. Khashoggi memberi pesan ke Cengiz untuk menelepon staf Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan jika tidak ada kabar darinya. Cengiz menunggu kurang lebih 10 jam di luar gedung untuk menunggu kabar dari Khashoggi. Hatice Cengiz kembali keesokan harinya namun tetap tidak ada kabar dari calon suaminya. Cengiz menunggu di luar hingga pukul 16:41 di tanggal 3 Oktober namun tetap tidak ada kabar terbaru dari Khashoggi. Cengiz kemudian menelepon Dr. Yasin Aktay—seorang kawan lama Khashoggi yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Turki. Esok harinya pemerintah Turki menyatakan Khashoggi masih berada di dalam gedung

namun tidak diketahui kondisinya. Pernyataan berbeda diungkap pemerintah Arab Saudi menyebut, Khashoggi sudah meninggalkankedung (Washington Post, 2018).

Saat rekaman CCTV diputar, terlihat Khashoggi memasuki gedung Konsulat di tanggal 2 Oktober pukul 13:13 waktu Turki. Ketika di depan pintu masuk, Khashoggi diberi tahu penjaga tentang surat penangkapan dirinya oleh Interpol namun Khashoggi menolak untuk memberi tahu keluarganya dan tetap memasuki gedung konsulat. Ketika memasuki gedung, dalam rekaman terdengar suara Khashoggi berubah menjadi takut dan penuh kecemasan. Khashoggi bertanya kepada segerombolan orang di depannya, "Apa kalian akan menyuntik saya?", lalu dijawab, "Ya". Suara yang terdengar menunjukkan kepala Khashoggi ditutup oleh plastik yang membuat suaranya menjadi tidak jelas. Jamal Khashoggi terus bertanya apakah ia sedang disekap dan pertanyaan-pertanyaan lain seperti, "Bagaimana ini bisa terjadi di sebuah kantor kedutaan?" (Agence France-Presse, 2019). Lalu suara berikutnya terdengar: "Biarkan ia memotong,". Lalu salah satu orang disana terdengar berteriak, "Ini sudah selesai," dan orang yang lain lagi berteriak, "Lepas, lepaskan. Pasang ini di kepalanya. Bungkus, lah." Penyidik hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka telah memutus kepala dari Jamal Khashoggi.

Reaksi dari Austria terhadap kasus ini adalah ketika Austria menjadi presiden dari Komisi Eropa. Presiden Komisi Eropa di tahun 2018 dijabat oleh Austria lewat Menteri Luar Negeri—Karin Kneissl. Ketika itu, Austria bersama Jerman dan Perancis menyatakan bahwa Uni Eropa lewat komisi mereka akan memberhentikan penjualan senjata oleh negara Uni Eropa ke Arab Saudi atau melakukan arm sales embargo terhadap negara tersebut. Faktor pemicu dari keluarnya embargo tersebut adalah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan keterlibatan Arab Saudi dalam Perang Yemen tahun 2014. Pembunuhan Jamal Khashoggi mendapatkan reaksi dari Menteri Luar Negeri Austria ketika itu—Karin Kneissl—untuk menuntut penyidikan menyeluruh dan independen di kasus ini (ParsToday, 2018). Hal ini menjadi faktor eksternal pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Arab Saudi.

c. Vonis Hukuman Mati terhadap Murtaja Quereiris

Murtaja Quereiris adalah seorang remaja berusia 18 tahun ketika itu yang ditahan di ruang isolasi ketika usianya baru menginjak 13 tahun. Quereiris ditahan sejak tahun 2014 di perbatasan Arab Saudi ketika bersiap untuk pergi ke Bahrain bersama keluarganya. Penangkapan tersebut

dilatarbelakangi oleh aksi Quereiris ketika mengikuti dan melakukan serangkaian aksi demo di Musim Semi Arab (Arab Spring) di tahun 2011 yang menuntut reformasi dan demokratisasi pemerintahan di Timur Tengah (CNN, 2019). Musim Semi Arab ialah gelombang demo dan protes yang berlangsung di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah oleh sekelompok massa yang menuntut digulingkannya pemerintahan otoriter, menuntut demokratisasi pemerintahan, dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Quereiris terlibat dalam gelombang demo dan protes tersebut.

Dalam aksinya, Qureiris menggunakan kaos dan sandal jepit bersama kakak dan ayahnya. Quereiris dalam aksinya menggunakan sepeda dan berteriak lantang menggunakan megafon lewat kata-kata seperti, "Rakyat menuntut (perlindungan terhadap) Hak Asasi Manusia!" (CNN, 2019). Quereiris melakukan aksinya di kota Awamiyah, kota sebelah timur Arab Saudi. Kota Awamiyah sendiri merupakan kota dengan mayoritas Islam Syiah, sebuah denominasi minoritas yang dianggap bertentangan dengan Islam Sunni mayoritas di Arab Saudi. Karena statusnya sebagai Islam Syiah, Quereiris sering menerima perlakuan intimidatif oleh polisi yang menangkapnya. Quereiris diadili di tahun 2018 di Pengadilan Kriminal Spesial yang digunakan untuk mengadili para aktivis dan pemrotes dengan tuduhan berpartisipasi pada protes anti-pemerintah, menghadiri pemakaman kakaknya, bergabung dengan organisasi teroris, dan melemparkan bom molotov ke kantor polisi dan menembaki pasukan keamanan.

Qureiris ketika divonis masih berusia 18 tahun dan akhirnya dinyatakan untuk dihukum mati setelah ditahan di penjara selama 4 tahun dari 2014. Akibat menderita tantangan yang kuat dari dunia internasional, Quereiris tidak jadi dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi namun hukumannya diganti oleh hukuman penjara selama 12 tahun dan masa percobaan selama 4 tahun yang berarti Quereiris bisa bebas di tahun 2022 (VoA News, 2019). Meski begitu, Arab Saudi tetap membiarkan hukuman mati terhadap seseorang ketika tindakan tersebut layak untuk dihukum mati sesuai hukum Syariah.

Reaksi Austria terhadap kasus ini adalah manifestasi paling nyata dari pembahasan artikel ini. Dari kasus ini, terlihat Austria menutup KAICIID sebagai respon vonis hukuman mati terhadap Murtaja Quereiris yang tercatat di resolusi 77/E XXVI. GP Dewan Nasional tanggal 12 Juni 2019. Dari resolusi tersebut terlihat bahwa penutupan KAICIID sebagai respon atau reaksi Austria dari

kasus tindakan HAM Saudi Arabia. Terlihat dari resolusi tersebut juga di ayat pertama dimana Austria mempertegas posisi mereka untuk mencegah eksekusi Murtaja Qureiris dan berlanjut di ayat berikutnya dimana Austria menghentikan dan menarik diri dari perjanjian pendirian KAICIID.

Penutupan KAICIID di Austria dalam artikel ini dilihat menggunakan teori kebijakan luar negeri milik Richard C. Snyder yang fokus terhadap dua faktor, yaitu faktor domestik dan faktor eksternal dari kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut memang tidak seluruhnya bersifat kausatif, tetapi merupakan hasil analisa dari narasi, tindakan, hingga kebijakan pejabat-pejabat tinggi dan masyarakat Austria. Hal tersebut sejalan dengan teori Snyder yang melihat faktor subjektif yang memberi penekanan (put an emphasis) pada persepsi pemimpin negara dalam mendefinisikan situasi Islamofobia di Austria. Faktor tersebut penulis elaborasikan ke dalam beberapa tindakan yang memiliki kesamaan atau benang merah. Kedua faktor tersebut melatarbelakangi penutupan organisasi KAICIID.

KESIMPULAN

Berdirinya KAICIID di Wina, Austria menempatkan organisasi ini terjebak ke dalam permainan politik tingkat tinggi di Austria. Hal ini membuat KAICIID sering mendapatkan gertakan atau ancaman penutupan yang akhirnya menjadi benar-benar ditutup di tanggal 12 Juni 2019. Faktor dalam negeri dibalik penutupan KAICIID menjadi sangat signifikan terutama intensitas Islamofobia. Faktor dalam negeri seperti ini terkait dengan kedatangan imigran dalam jumlah besar di tahun 2015 lalu.

Sementara dari faktor eksternal sendiri menjadi jelas terlihat melalui tiga tindakan pemerintah Arab Saudi yang sangat konservatif dan melarang kebebasan menyampaikan pendapat secara penuh. Tiga tindakan tersebut memiliki benang merah dan dianggap oleh Austria sebagai pelanggaran HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai liberalisme dan demokrasi. KAICIID berdiri di tempat yang menjunjung tinggi kedua nilai diatas membuat KAICIID dianggap sebagai "Silence Center" yang diam ketika pemerintah Arab Saudi melakukan pelanggaran HAM—melenceng dari tujuan kohesi sosialnya.

Hal ini dikarenakan Arab Saudi merupakan negara sponsor dari pendirian KAICIID di Austria. Dari kedua fakta tersebut, penutupan KAICIID menjadi mungkin untuk dilakukan oleh

pemerintah Austria di tahun 2019 lalu. Riset selanjutnya tentang penutupan KAICIID bisa dikembangkan salah satunya dampak penutupan KAICIID bagi hubungan Austria – Arab Saudi secara khusus atau hubungan yang lebih besar antara Eropa – Arab Saudi dalam melihat faktor-faktor yang saling mempengaruhi (interplay) lalu bagaimana Arab Saudi— sebagai negara Islam—memainkan peran mereka di luar kawasan Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nimer., Mohammed & Renáta Katalin Smith. (2016). "Interreligious and intercultural education for dialogue, peace and social cohesion". *International Review of Education*. 62(4), 393-405. <http://dx.doi.org/10.1007/s11159-016-9583-4>
- Agence France-Presse. (2019). "I Play Music When Cutting...": Jamal Khashoggi Killers Heard On Secret Tapes: Report. <https://www.ndtv.com/world-news/before-jamal-khashoggi-murder-suspects-called-him-sacrificial-animal-made-chilling-jokes-report-2110366>
- B., F., Robert. (1956). "Soviet Policy toward Western Europe Since Stalin". *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 303, 166-178. Available at: <https://www.jstor.org/stable/1032300>
- Bayrakli, Enes, Farid Hafez. (2020). *EUROPEAN ISLAMOPHOBIA REPORT*. Berlin: SETA
- Bayrakli., Enes dan Farid, Hafez. (2018). "European Islamophobia Report". *Islamophobia Report*. Diambil dari: <https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2018/04/Austria.pdf>
- BBC. (2016). "Migrant crisis: Austria passes controversial new asylum law". Diambil dari: <https://www.bbc.com/news/world-europe-36152927>
- BBC. (2018). "Austria to shut seven 'political' mosques and expel imams". Diambil dari: <https://www.bbc.com/news/world-europe-44410597>
- BBC. (2018b). "The Islamic veil across Europe". Diambil dari: <https://www.bbc.com/news/world-europe-13038095>
- Bell, Bethany. (2012). "Austria celebrates 'model' law on Islam". BBC. <https://www.bbc.com/news/world-europe-18675493>
- Bodlos, Anita. (2018). "The 2017 Austrian snap election: a shift rightward". *West European Politics*. 41(6), 1354-1363. <https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1429057>
- Bundeszentrale für politische Bildung. (2012). "Parallelgesellschaften?". Diambil dari: <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/30001/parallelgesellschaften>
- Burchardt., Dr. Marian. (2015). *After Integration: Islam, Conviviality and Contentious Politics in Europe*. New York: Springer Publishing.
- Chia, Edmund Kee-Fook. (2016). *Interfaith Dialogue Global Perspectives*. London: Palgrave Macmillan.
- CNN. (2019). "He was arrested at 13. Now Saudi Arabia wants to execute him". <https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/middleeast/saudi-teen-death-penalty-intl/>
- Die Presse. (2017). "Zahl der Muslime in Österreich seit 2001 verdoppelt". <https://www.diepresse.com/5263601/zahl-der-muslime-in-osterreich-seit-2001-verdoppelt>

- Dw. (2021). "Would Canadian citizenship free Saudi blogger Raif Badawi?".
<https://www.dw.com/en/would-canadian-citizenship-free-saudi-blogger-raif-badawi/a-56984271>
- Fundamental Right Agency Report. (2017). "Muslims – Selected findings".
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
- Grung., Anne Hege. (2017). "Interreligious Dialogue in the Squeeze between Diplomacy and Contextual Practices". *The Journal of Interreligious Studies*. 21(2017), 37-44.
- Hafez, Farid. (2017). "Austrian Muslims Protest Against Austria's Revised "Islam Act". *Journal of Muslim Minority Affairs*. 37(3), 267-283. <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1379693>
- Hopper., Tristin. (2018). "What did Raif Badawi write to get Saudi Arabia so angry?". *National Post*. Diambil dari: <https://nationalpost.com/news/canada/what-did-raif-badawi-write-to-get-saudi-arabia-so-angry>
- Kiyagan., Askin. (2018). "Austria prepares for headscarf ban in primary schools". *Anadolu Agency*. <https://www.aa.com.tr/en/europe/austria-prepares-for-headscarf-ban-in-primary-schools/1317783>
- Kiyagan., Askin. (2019). "Islamophobia on the rise in Austria". *Anadolu Agency*.
<https://www.aa.com.tr/en/europe/islamophobia-on-the-rise-in-austria/1440623>
- Klamar., Joe. (2017). "Austrian Parliament Bans Full Facial Veils in Public". *New York Times*.
<https://www.nytimes.com/2017/05/17/world/europe/austria-veil-ban-muslim.html>
- Kolb, Jonas. (2020). "Constituted Islam and Muslim Everyday Practices in Austria: The Diversity of the Ties to Religious Organizational Structures and Religious Authorities in the Process of Change". *Journal of Muslim Minority Affairs*. 40(3), 371-394. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1819129>
- Kolb, Jonas. (2021). "Muslim diversity, religious formation and Islamic religious education. Everyday practical insights into Muslim parents' concepts of religious education in Austria". *British Journal of Religious Education*. 43(1), 1-14.
<https://doi.org/10.1080/01416200.2021.1911787>
- Kumaraswamy., P. R. & Quamar., M. M. (2016). "More effective as regent than as monarch". *Contemporary Arab Affairs*. 9(3), 445-460. <https://www.jstor.org/stable/48599983>
- Mas'oed, Mohtar. (1989). *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial.
- Oe24. (2019). "Panik nach Schüssen vor größter Moschee Österreichs". Diambil dari: <https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/panik-nach-schuessen-vor-groesster-moschee-oesterreichs/375267972>
- Oltermann., Philip. (2018). "Austrian full-face veil ban condemned as a failure by police". *The Guardian*. Diambil dari <https://www.theguardian.com/world/2018/mar/27/austrian-full-face-veil-ban-condemned-failure-police-integration-smog-marks-animal-costumes>
- Pars Today. (2018). "Austria: Narasi Saudi soal Pembunuhan Khashoggi tidak Memuaskan".
- Pongratz-Lippitt., Christa. (2015). "Vienna's Saudi-backed interfaith centre 'could close' after floggings". *The Tablet*. <https://www.thetablet.co.uk/news/1631/vienna-s-saudi-backed-interfaith-centre-could-close-after-Publishing>
- Reuters. (2018). "Austria's government aims to ban headscarves in kindergarten". Diambil dari:

- <https://www.reuters.com/article/us-austria-politics-headscarves-idUSKCN1HB1OY>
- Sezgin, Zeynep. (2018.) "Islam and Muslim Minorities in Austria: Historical Context and Current Challenges of Integration". *Journal of International Migration and Integration*. 19(2019), 869-886. <https://doi.org/10.1007/s12134-018-0636-3>
- Snyder, C. Richard, Bruck, H.W, Sapin, Burton. (2002). *Foreign Policy Decision- Making, An Approach to the study of International Politics*. Whitefish, MT: Literary Licensing.
- Speer, B. (2018). "External and Internal Effects of How Austria Has Handled the Refugee Crisis". *Hrvatska i komparativnajačna uprava – Croatian and Comparative Public Administration (HKJU-CCPA)*. 18(2), 247–268.
- Sticker., Maja. (2008). "Das Sondermodell Österreich und die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ)". 4(2008), 1-29. <https://www.univie.ac.at/alumni.ksa/assa/ausgaben/assa-journale/journal-2008/islam-in-oesterreich/>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Traill., Kim. (2019). "Muslim women in this European country are being attacked at an unprecedented rate". *Special Broadcasting Service*.
<https://www.sbs.com.au/news/muslim-women-in-this-european-country-are-being-attacked-at-an-unprecedented-rate>
- Voa News. (2019). "Saudi Teenager Spared From Execution". <https://www.voanews.com/middle-east/saudi-teenager-spared-execution>
- Washington Post. (2018). "Jamal Khashoggi's final months as an exile in the long shadow of Saudi Arabia". https://www.washingtonpost.com/world/national-security/jamal-khashoggis-final-months-an-exile-in-the-long-shadow-of-saudi-arabia/2018/12/21/d6fc68c2-0476-11e9-b6a9-0aa5c2fcc9e4_story.html
- Yahoo. (2018). "Austria to expel up to 60 imams, close 7 mosques".
<https://sports.yahoo.com/austria-expel-60-imams-shuts-7-mosques-082220317.html>